

Tabel 2.120
 Luas Wilayah Pertambangan Menurut Jenis Bahan Tambang di Provinsi
 Banten (Ha) Tahun 2015-2017

No	Jenis Bahan Tambang	2015		2016		2017	
		m3	Ton	m3	ton	m3	Ton
1	Batu Bara	-		-	320,29	-	320,29
2	Emas	-		-	30	-	0,59
3	Perak	-		-	-	-	4,17
4	Andesit	2.707.742		1.490.039	-	2.657.506,18	-
5	Zeolit	-		-	-	750	-
6	Galena	-		21.856	-	-	-
7	Pasir Darat	422.754		2.500.090	-	649.945	-
8	Pasir Kuarsa	194.368		217.089	-	209.275,1	-
9	Pasir Kali (sungai)	-		-	-	-	-
10	Bentonit	-		29.076	-	-	-
11	Tanah Liat	-		-	-	-	-
12	Tanah Urug	63.255		-	-	681.718	-
13	Batu Gamping	1.465.396		-	-	1.457.836,8	-
14	Tras	16.497		119.287	-	-	-
15	Pasir Besi	-		-	-	-	-
16	Pasir Laut	13.041.391		7.902.666	-	373.500	-
17	Makadam	-		-	-	-	-
18	Feidspar	500		-	-	-	-
19	Breksi Tufaan	-		-	-	-	-
20	Seng/Zn	-		-	-	-	-
21	Mangan	-		-	-	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tabel 2.121
 Sumber Utama penerangan Rumah Tangga Tahun 2017

Sumber Utama Penerangan			
Kabupaten/ kota	Listrik	Bukan Listrik	Jumlah
Kabupaten			
Pandegalang	99,84	0,16	100,00
Lebak	99,75	0,25	100,00
Tangerang	100,00	0,00	100,00
Serang	100,00	0,00	100,00

Sumber Utama Penerangan			
Kabupaten/ kota	Listrik	Bukan Listrik	Jumlah
Kota			
Tangerang	100,00	0,00	100,00
Cilegon	100,00	0,00	100,00
Serang	99,82	0,18	100,00
Tangerang Selatan	100,00	0,00	100,00
Provinsi Banten	99,95	0,05	100,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh pontensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

Tabel 2.122
 Realisasi Penjualan Gas Kota Triwulanan di Provinsi Banten
 Tahun 2009 s.d Tahun 2017

Tahun	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
2009	306.400.862	301.589.707	321.949.580	344.344.700	1.274.287.849
2010	415.427.341	398.114.512	420.491.718	440.800.790	1.674.834.361
2011	394.972.658	397.275.300	413.582.906	451.887.088	1.657.717.952
2012	408.684.818	403.345.700	435.750.977	408.425.545	1.656.207.040
2013	363.990.947	385.858.980	375.381.161	419.485.517	1.517.716.605
2014	407.173.104	430.603.933	389.784.806	423.063.576	1.650.625.419
2015	410.337.224	386.537.692	403.030.991	419.104.492	1.619.010.401
2016	394.256.619	385.010.685	339.414.335	347.059.780	1465741419
2017	332.449.891	349.581.054	351.726.889	358.445.347	1.329.203.181

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

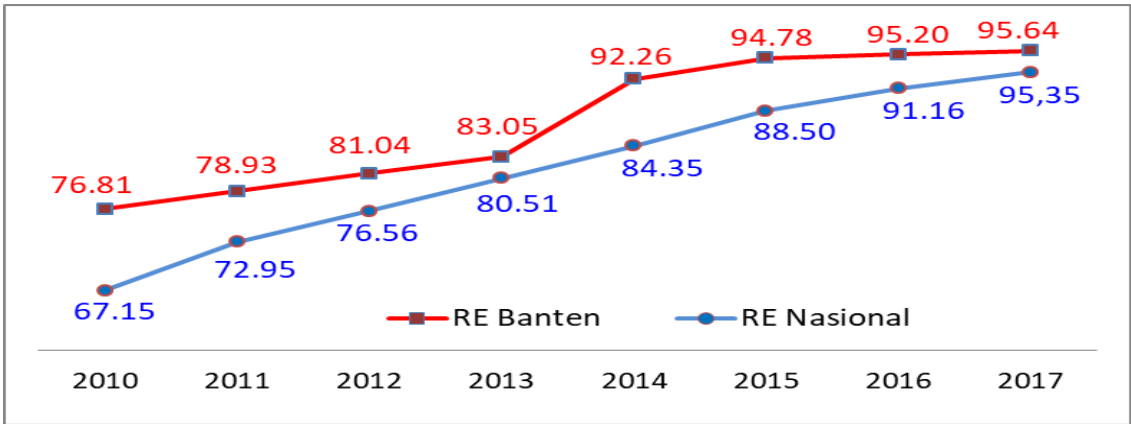
Pada tahun 2017, jumlah pelanggan listrik di wilayah Provinsi Banten sebanyak 2,93 juta pelanggan, dengan daya tersambung sebesar 9,90 juta kVA dan energi yang terjual sebesar 21,68 juta MWh.

Tabel 2.123
Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Terjual
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Menurut Jenis Tarif
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Klasifikasi	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (kVA)	Energy Terjual (MWh)
1	Sosial	52.711	177.958	261.901
2	Rumah Tangga	2.711.966	2.686.734	4.599.679
3	Bisnis	150.570	1.632.983	2.599.679
4	Industri	6.324	5.193.554	2.520.949
5	Pemerintahan	9.548	148.378	13.623.275
6	lainnya	1.462	64.299	238.722
Jumlah		2.932.581	9.903.905	21.681.470

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Perkembangan rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio elektrifikasi Banten tahun 2017 telah mencapai 95,64%, namun dengan distribusi yang belum merata, dan sebanyak 132.762 rumah tangga belum berlistrik.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.38
Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Banten Tahun 2010-2017

Tabel 2.124
Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2017

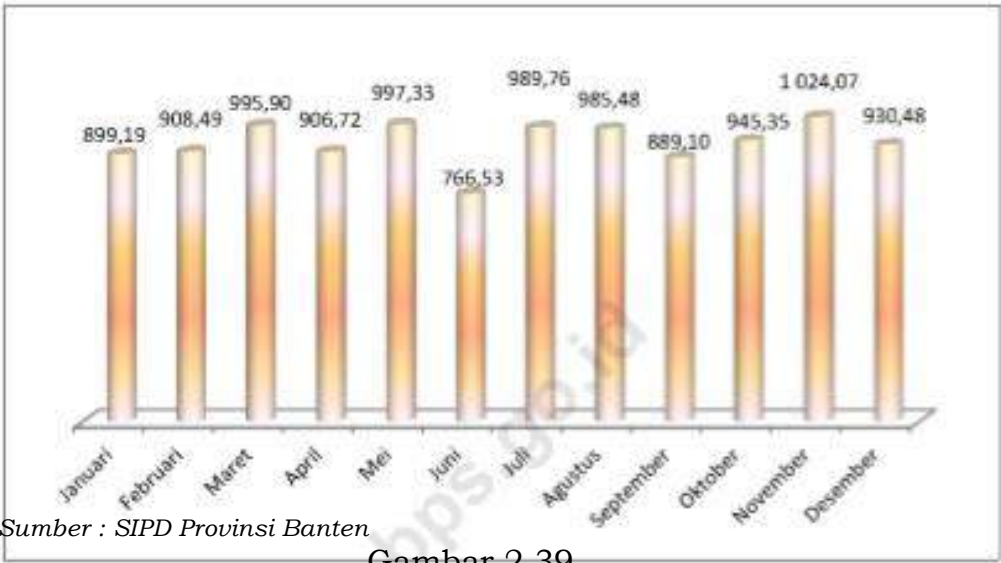
Kabupaten/kota	Rasio Elektrifikasi (%)	Rumah Tangga Belum Berlistrik
Kabupaten		
Pandeglang	86,47	38.292
Lebak	86,20	43.111
Tangerang	96,96	26.642
Serang	93,95	20.604
Kota		

Kabupaten/kota	Rasio Elektrifikasi (%)	Rumah Tangga Belum Berlistrik
Tangerang	99,99	16
Cilegon	98,87	1.149
Serang	98,31	2.462
Tangerang Selatan	99,88	486
Provinsi Banten	95,64	132.762

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

2.3.2.6. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Nilai ekspor Provinsi Banten tahun 2017 sebesar US\$11,24 miliar, naik 20,49 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$9,33 miliar. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$10,97 miliar (97,68%), sementara sisanya berasal dari sektor pertanian US\$233,58 juta (2,08%), migas US\$24,75 juta (0,22%), serta pertambangan dan lainnya US\$2,49 juta (0,02%). Nilai impor Provinsi Banten tahun 2017 sebesar US\$11,03 miliar, naik 29,53 persen dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang sebesar US\$8,51 miliar. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan barang penolong sebesar US\$10,49 miliar (95,10%), sedangkan sisanya berupa barang modal US\$299,69 juta (2,72%) dan barang konsumsi US\$240,37 juta (2,18%).



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.39
 Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Bulan (juta US\$) Tahun 2017

Tabel 2.125
 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Banten (juta US\$)
 Tahun 2014-2018

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Ekspor Neto
2014	10.231,20	12.180,91	-1.949,71
2015	9.046,27	9.851,99	-805,72
2016	9.326,94	8.512,21	814,73
2017	11.238,39	11.025,96	212,43
2018			
Januari	992,29	990,29	2,00
Februari	894,23	978,31	-84,08
Maret	987,87	892,55	95,32
April	1.012,35	1.163,7	-151,35
Mei	1.147,37	1.210,31	-62,94
Juni	731,75	851,38	-119,63

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2018

Tabel 2.126
 Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk (juta US\$)
 Tahun 2016-2017

Jenis Produk	Nilai Ekspor	
	2016	2017
Migas	38,96	24,75
Pertanian	186,4	233,58
Industri Pengolahan	9.099,16	10.977,57
Pertambangan dan lainnya	2,39	2,49

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.127
 Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Golongan Penggunaan Barang
 (juta US\$) Tahun 2016-2017

Penggunaan Barang	Nilai impor	
	2016	2017
Barang Konsumsi	217,46	240,37
Bahan Baku dan bahan Penolong	8.013,24	10.485,89
Barang Modal	281,51	299,69
Jumlah	8.512,21	11.025,96

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.7. Perindustrian

Pada tahun 2016, di Provinsi Banten terdapat 1.862 perusahaan industry besar dan sedang, dengan tenaga kerja sebanyak 514.462 orang. Nilai produksi yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah sebesar 440,20 trilyun rupiah.

Tabel 2.128
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Kab Pandeglang	11	757	178.328.841
Kab Lebak	23	3.655	1.241.720.966
Kab Tangerang	757	182.308	116.639.653.649
Kab Serang	184	82.343	58.507.799.094
Kota Tangerang	638	189.036	129.137.886.793
Kota Cilegon	79	22.386	125.403.394.171
Kota Serang	25	1.175	229.704.749
Kota Tangerang Selatan	145	32.802	8.858.684.095
Provinsi Banten	1.862	514.462	440.197.172.358

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.4. Urusan Penunjang

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten menyusun perencanaan pembangunan dengan pendekatan money follow program. Dengan demikian diharapkan pendekatan penganggaran akan lebih fokus pada pembiayaan belanja daerah dalam kegiatan perangkat daerah dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat serta mendukung prioritas nasional.

Pendekatan money follow program mendukung perencanaan yang holistik tematik yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, terintegrasi yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional, dan spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Tabel 2.129
Jumlah Kegiatan Belanja Langsung dalam APBD
Provinsi Banten Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kegiatan
1	2014	939
2	2015	1047
3	2016	1467
4	2017	1191
5	2018	1257

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Pada Tahun 2014 Provinsi Banten pernah mendapatkan penghargaan anugerah pangripta nusantara kategori A tingkat provinsi terbaik ketiga, yang pada saat ini berganti nama menjadi penghargaan pembangunan daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem perencanaan terpadu yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring evaluasi. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2.3.4.2. Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di kementerian/lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten telah meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.130
 Penilaian BPK Terhadap APBD Provinsi Banten

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Opini BPK	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem aplikasi terpadu antara *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev*. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai menjadi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

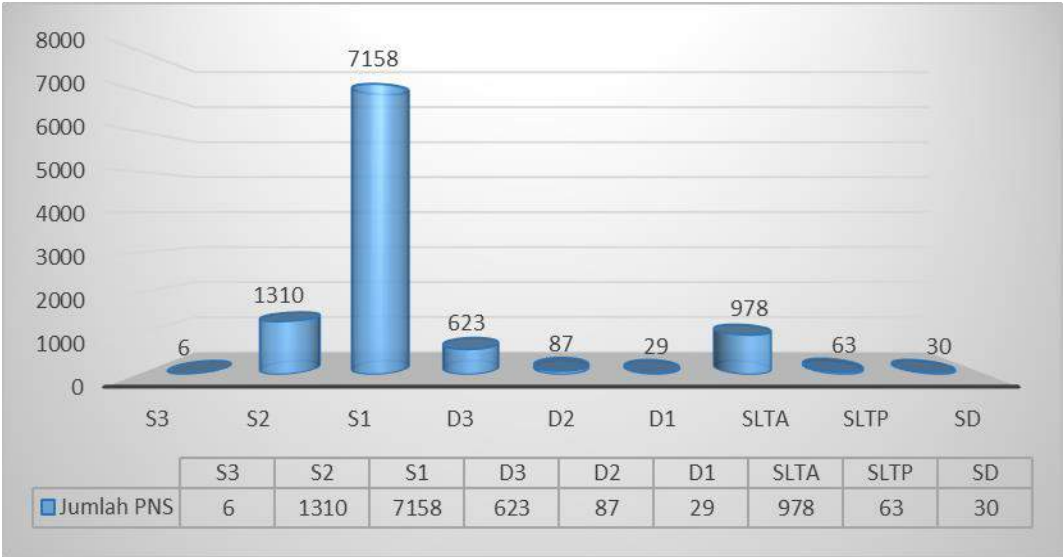
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota dipindahkan ke provinsi. Dengan demikian Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, ASN tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK dan sederajat dari Kabupaten/Kota pindah status ke Provinsi sejumlah 5.909 Orang. Pemerintah Provinsi Banten mempunyai jumlah ASN yang cukup memadai, yakni 10.284 orang termasuk dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini merupakan potensi *human capital* yang strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.40

ASN Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.41

Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Banten yang besar di golongan III, hal ini diperlukan strategi yang tepat sehingga potensi tersebut dapat optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten. Dan berdasarkan grafik 2. Tingkat pendidikan ASN Banten jumlahnya besar pada tingkat s1 dan s2, hal ini merupakan potensi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan ASN yang sesuai dengan bidangnya. Pemerintah Provinsi belum menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN atau *Human Capital Development Plan* (HCDP). Hal ini diperlukan untuk

mengoptimalisasikan kualitas kompetensi ASN Provinsi Banten sehingga dapat mendukung secara signifikan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel 2.131
Rekapitulasi Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH ALUMNI						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Diklat Struktural Bagi PNS Daerah								
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	40	40	40	40	40	-	200
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	160	118	80	40	40	40	478
3	Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk. III	62	115	140	142	200	99	758
4	Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk. IV	154	120	180	322	560	480	1816
Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten								
1	Diklat Prajabatan Gol III	214	108	-	66	90	-	478
2	Diklat Prajabatan Gol II K1/K2	-	-	-	349	-	-	349
3	Diklat Prajabatan Gol III K2/K2 Pola Kontribusi	-	-	-	1468	800	-	2268
4	Diklat Prajabatan Gol II K1/K2 Pola Kontribusi	-	-	-	1420	800	-	2220
5	Diklat Prajabatan Gol II	74	158	-	-	53	-	285
6	Diklat Prajabatan K1/K2 Pola Kontribusi	-	-	-	-	360	-	360
JUMLAH		704	659	440	3847	2943	619	9212

Sumber Data : SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 2.123 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten telah menyelenggarakan diklat struktural dan diklat prajabatan bagi ASN Provnsi Banten sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. Dengan diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, BPSDM Provinsi Banten dalam menyelenggarakan diklat harus berdasarkan pada analisis peningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan kelas jabatannya.

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang “Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang “Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan”, memberikan arahan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, berkaitan dengan upaya menata, mengatur, dan menghasilkan teknologi, yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha.

Peran penting penelitian dan pengembangan dalam melahirkan inovasi menjadi kata kunci bagi peningkatan daya saing bangsa atau wilayah. Peraturan Pemerintah nomor 38/2017 tentang Inovasi Daerah diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan ideal bagi tumbuh kembangnya inovasi. Letak strategis provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota dan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera hanya akan menjadi keunggulan komparatif jika tidak disertai inovasi. Karenanya keberadaan lembaga penelitian yang ada di wilayah Provinsi Banten seperti halnya PUSPIPTEK (Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimilikinya akan menjadi capital lebih bagi provinsi ini untuk meningkatkan daya saingnya. Sumber daya Litbang di Provinsi Banten juga diwanai dengan banyaknya perguruan tinggi swasta ternama seperti Universitas Pelita Harapan, Swiss German University, Universitas Multi Media Nusantara atau pun perguruan tinggi lainnya yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk kolaborasi berbagai sumber daya Iptek tersebut.

Tabel 2.132
Data Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
di Provinsi Banten

No	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Universitas	24
2	Sekolah Tinggi	53
3	Institut	2
4	Politeknik	4
5	Akademi	30
	Jumlah	167

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Permasalahan inovasi juga tidak dipahami sebatas penggunaan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Persoalan inovasi juga dapat digunakan untuk menjawab berbagai kendala bisnis proses yang mungkin dijumpai dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Paradigma tata kelola pemerintahan pasca reformasi yang memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melahirkan tuntutan Inovasi pelayanan public yang dapat dilahirkan melalui pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan

2.3.4.5. Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Tabel 2.133
Capaian Kinerja Pengawasan Pemerintah Provinsi Banten

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Nilai Maturitas SPIP	2	2	3
Nilai Kapabilitas APIP	1	1	2

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 2.125 Kinerja pengawasan Provinsi Banten dari tahun ke tahun meningkat kualitasnya. Hal ini perlu menjadi komitmen antar pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pengawasannya dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Pemerintah Provinsi Banten.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten dapat dilihat dari kebutuhan kalori masyarakat. Dari tabel ini terlihat bahwa konsumsi pangan yang beragam belum bisa dicapai, sumber kalori utama masyarakat sangat tergantung pada padi-padian, akibatnya tingkat ketersediaan pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi.

Rata-rata konsumsi kalori di Provinsi Banten tahun 2017 adalah sebanyak 2.249,33 kilo kalori per kapita per hari, naik 5,35 persen dari tahun 2016 yang sebanyak 2.135,13 kilo kalori per kapita per hari.

Tabel 2.134
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari
Menurut Kelompok Makanan (kkal) Tahun 2012-2017

Kelompok Makanan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Padi-padian	882,04	850,36	847,77	871,6	915,06	861,81
Umbi-umbian	15,66	15	14,99	21,85	26,64	37,81
Ikan	42,52	45,16	45,55	42,89	43,76	50,83
Daging	67,87	53,17	57,73	70,2	70,60	87,87
Telur dan susu	47,39	68,05	66,69	70,45	69,16	72,63
Sayuran	33,07	33,44	34,19	25,57	28,23	33,47
Kacang-kacangan	53,75	55,9	55,05	53,75	61,34	60,35
Buah-buahan	30,2	33,46	36,27	39,17	35,02	47,64
Minyak dan lemak	212,58	221,78	233,47	252,8	267,85	262,06
Bahan minuman	59,36	79,21	72,64	81,13	85,20	78,76
Bumbu-bumbuan	17,4	21,34	21,09	8,42	11,38	14,56
Konsumsi lainnya	52,42	62,57	58,2	69,45	68,18	75,78
Makanan dan minuman jadi	303,54	403,78	387,4	460,12	452,69	565,76
Jumlah	1.809,3	1.943,2	1931	2.067,4	2.135,13	2.249,33

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2018 (diolah)

2.4.2. Pemerintahan dan Kelembagaan

2.4.2.1. BUMD Pemerintah Provinsi Banten

Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki dua (2) BUMD, yaitu PT Jamkrida Banten dan PT. Banten Global Development. Masing-masing lembaga berupaya untuk mencapai kinerja yang baik agar dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian untuk meningkatkan PAD perlu dibentuk BUMD dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

a. PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (PT Jamkrida Banten).

PT Jamkrida Banten merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan. PT Jamkrida Banten hadir sebagai implementasi atas regulasi dan apresiasi Pemerintah untuk para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Merespon regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten untuk mendukung pembangunan ekonomi di bidang Koperasi dan UMKM. Pembentukan Jamkrida Banten dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usaha sehingga Koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Adapun tujuan pembentukan Jamkrida Banten adalah:

1. Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
2. Memberdayakan Koperasi dan UMKM;
3. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing.

5. Meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPD, Bank Umum dan BPR.

Komposisi saham PT. Jamkrida Banten adalah 51 % (Lima puluh satu persen) Pemerintah Provinsi Banten, dan pemegang saham lainnya paling tinggi 49 %. Yang dimaksud pemegang lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia.

Mempertimbangkan rencana usaha perseroan tahun 2016-2020, maka untuk memenuhi volume penjaminan yang terus meningkat diperlukan tambahan modal dari pemegang saham. Oleh karenanya, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No : 174, tanggal 31 Agustus 2016 dihadapan Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH Notaris di Kota Serang yang telah disetujui oleh Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0016122.AH.01.02 tanggal 5 September 2016 telah dilakukan perubahan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah).

Besarnya modal dasar dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan dan asumsi bahwa modal yang telah disetor dianggap sebagai pemenuhan minimal atas modal dasar yang akan ditetapkan. Pemerintah provinsi Banten telah memenuhi kewajiban/penyertaan modal PT Jamkrida Banten, sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Sejak Oktober 2014 – 2015 Jamkrida Banten hanya memberikan penjaminan terhadap lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang konvensional, namun dengan memperhatikan perkembangan dan kesempatan pasar yang ada, pada tahun 2016 memutuskan untuk membuka Unit Usaha Syariah.

b. PT Banten Global Development

Perusahaan Daerah Banten Global Development didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Tujuan pembentukan PT. Banten Global Development adalah untuk:

1. Pengembangan usaha baru yang diawali dengan pembentukan anak perusahaan dalam bentuk sub holding.
2. Menjalin kerjasama dengan mitra penyandang dana yang mempunyai keahlian tertentu untuk pengembangan usaha.
3. Mendapat penugasan khusus.

Penyertaan modal daerah ke dalam BUMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.135
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Sampai Dengan
Tahun 2017

Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Tahun ini
PT. BANK JABAR BANTEN	Perda No.3 Tahun 2007	130.147.464.173
BPR/LPK	Perda No.3 Tahun 2007	10.200.000.000
BPR/LPK	Perda No.4 Tahun 2009	19.412.000.000
PT.BGD	Perda No.1 Tahun 2012	34.961.227.000
PT.PPKD/Jamkrida	Perda No.4 Tahun 2013	51.000.000.000
PT.BGD	Perda No.5 Tahun 2013	614.600.000.000
JUMLAH		860.320.691.173

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten dan juga potensi ekonomi daerah yang begitu pesat, sudah seharusnya diantisipasi melalui pembentukan badan usaha milik daerah baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diselaraskan pada potensi dan karakteristik daerah meliputi bidang keuangan, bidang pertambangan, bidang aneka usaha, bidang infrastuktur, transportasi dan air, serta bidang pariwisata.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan provinsi Banten yang banyak memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar

15,28 % (BPS Provinsi Banten, per Agustus 2018). Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut belum diikuti dengan posisi tawar dalam hal pemasaran hasil produksi.

2.4.2.2. **Kerjasama Pembangunan Daerah**

Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah disebabkan pembangunan membutuhkan porsi anggaran yang besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Pemerintah Provinsi Banten memformulasikan bagaimana konsep pembangunan yang direncanakan tidak serta merta mengandalkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL/CSR) Perusahaan ataupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Potensi dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Banten yang bersumber dari TJSKBL/CSR dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.136
Daftar BUMD/BUMN/BUMS di Provinsi Banten

BUMN	BUMD	BUMS
1	2	3
PT. Krakatau Steel;	Banten Global Development (BGD);	PT. PT Indosat Ooredoo (Indosat);
PT. Angkasa Pura 2;	Bank Jabar dan Banten (BJB).	PT. XL Axiata.Tbk;
PT. Pelindo 2;	PT. JAMKRIDA Banten	PT. Alam Sutera Tbk;
PT. ASDP;		PT. Ciputra Group;
PT. Pertamina;		PT. Paramount Land;
PT. Indonesian Power;		PT. Lippo Karawaci.Tbk;
PT. PLN;		PT. BSD;
PT. PGN;		PT. Astra Infra Toll Road;
PT. TASPEN;		PT. Perlite Indonesia Abadi;
ASKES;		PT. Krakatau Posco;
BPJS;		PT. Perkasa Jaya Sun;
SUCOPINDO;		PT. Asahimas Chemical;
Jasa Raharja;		PT. Cemindo Gemilang;
Bank Indonesia;		PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin;
Bank Republik Indonesia (BRI);		PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk;
Bank Tabungan Negara (BTN);		PT. Nippon Shokubai Indonesia;
Bank Negara Indonesia (BNI);		PT. Sulfindo Adiusaha;
Bank Mandiri;		PT. Spinmill Indah Industry;
PT. Pegadaian;		PT. Krakatau Osaka Steel;
PT. Telkomsel;		PT. Merak Energi Indonesia;
PT. Telkom;		PT. NS Bluescope Indonesia;
PT. Antam;		PT. Berkah Manis Makmur;
PT. perhutani;		PT. Indoferro;
PT. Marga Mandalasakti;		PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia;

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) salah satu skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP).

Tabel 2.137
Daftar Rencana Proyek Kerjasama

No	Rencana Proyek
1	Kerjasama pendirian Banten Mangrove Center
2	Kerjasama pengelolaan Situ
3	SPAM Regional
4	Pengelolaan Sampah Terpadu
5	Sport Center Provinsi Banten (KPBU / Non-KPBU)
6	Public facilities terkait pembangunan Tol Serang – Panimbang
7	Public facilities terkait pembangunan Waduk Karian dan Sindang heula

2.4.3. Kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja

2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu cara mengukur kualitas tenaga kerja adalah dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Pada saat ini sebagian besar orang yang bekerja di Banten hanya memiliki pendidikan dasar atau setingkat SMP ke bawah. Pada Februari 2017, sekitar 53,28 persen penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan dasar. Penduduk bekerja yang memiliki pendidikan menengah (setara SMA) sebesar 29,80 persen, dan yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebesar 16,92 persen. Dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, penduduk bekerja yang hanya berpendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan. Namun demikian, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi semakin memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja.



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.42
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015-2017

Berdasarkan daerah desa/kota, terlihat perbedaan yang cukup signifikan data penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Pada Februari 2017, penduduk bekerja di perkotaan yang hanya berpendidikan dasar sekitar 41,65 persen (1,63 juta orang), berpendidikan menengah sekitar 36,22 persen (1,42 juta orang) dan berpendidikan tinggi sekitar 22,14 persen (867 ribu orang). Di perdesaan, sebanyak 82,00 persen (1,30 juta orang) diantara penduduk bekerja hanya memiliki pendidikan dasar, sementara pekerja dengan pendidikan menengah sekitar 13,97 persen (221 ribu orang) dan pendidikan tinggi hanya sekitar 4,03 persen (64 ribu orang).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dari sisi pendidikan, kualitas penduduk bekerja di perdesaan jauh tertinggal dibandingkan dengan yang di perkotaan. Penduduk bekerja di perdesaan banyak terserap di sektor pertanian, di sektor ini tidak dituntut kualifikasi pendidikan yang tinggi.

Penduduk bekerja menurut pendidikan tidak memperlihatkan komposisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2017, persentase pekerja perempuan yang berpendidikan rendah lebih besar dibanding yang laki-laki. Hal ini juga terjadi pada tingkat pendidikan tinggi, pekerja perempuan berpendidikan tinggi persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki yaitu 18,08 persen berbanding 16,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dapat mengaplikasikan ilmunya dengan bekerja.

2.4.3.2. Nilai Tukar Petani/Nelayan

Nilai Tukar Petani/Nelayan (NTP/NTN) merupakan perbandingan dari indeks harga yang diterima petani/nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan(Ib). Selain itu, NTP/NTN biasa digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani/nelayan. Pada tahun 2017, rata-rata Nilai tukar Petani sebesar 98,85, dengan rata-rata Indeks Harga yang diterima (It) sebesar 127,49 dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) sebesar 127,79. Pada tahun yang sama NTP tertinggi sebesar 101,54 terjadi di bulan Desember dan terendah di bulan Maret sebesar 98,85.

Tabel 2.138
 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten
 Tahun 2012 – 2017

Bulan	Nilai Tukar Petani (NTP)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	107.66	110.51	105	105.42	106,61	98,97
Februari	108.61	110.03	105.27	105.19	106,57	97,92
Maret	107.69	109.38	105.59	105.09	104,74	98,19
April	107.25	109.65	105.62	102.79	103,42	98,94
Mei	107.03	109.73	104.23	102.30	102,03	98,86
Juni	107.66	109.70	104.35	103.22	101,54	100,19
Juli	107.53	109.33	104.54	103.28	101,32	99,60
Agustus	108.61	109.29	103.68	103.95	100,25	99,83
September	108.81	109.71	103.74	104.84	100,47	100,69
Oktober	109.51	111.41	104.80	106.07	100,55	101,01
November	109.83	111.88	104.71	107.53	100,30	101,29
Desember	111.07	104.84	105.46	107.45	100,49	101,54

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Jika dilihat secara makro, angka tersebut mencerminkan bahwasanya petani dan nelayan belum bisa hidup layak, dikarenakan nilai NTP/NTN masih dibawah 100, Penanganan yang terstruktur dan terprogram sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan diatas, dikarenakan ini menjadi salah satu sumber kemiskinan di pedesaan dan pesisir. Peningkatan produksi pangan (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan) harus senantiasa dilaksanakan dengan cara produksi yang baik dan benar dengan memperhatikan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan(*sustanaibel recourse*).

2.4.4. Kualitas hidup dan pengembangan infrastuktur

2.4.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah,yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah.



Gambar 2.43
 Luas Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 2016

2.4.4.2. Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan.

Tabel 2.139
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Banten (km) Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Pemerintah yang Berwenang Mengelola		
		Negara	Provinsi	Jumlah
1	Kab Pandeglang	62,51	175,83	283,34
2	Kab Lebak	218,80	185,92	404,72
3	Kab Tangerang	8,80	114,50	123,30
4	Kab Serang	57,61	241,62	299,23
1	Kota Tangerang	7,76	29,10	36,77
2	Kota Cilegon	23,47	3,42	26,89
3	Kota Serang	88,61	53,76	142,37
4	Kota Tangerang Selatan	9,01	48,75	57,76
Jumlah		476,49	852,89	1 329,38

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.140
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Banten (km) Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Kab Pandeglang	131,19	23,9	3,49	17,25
2	Kab Lebak	57,18	35,25	25,85	67,64
3	Kab Tangerang	47,00	21,93	7,82	37,75
4	Kab Serang	93,19	74,56	0,00	73,87
5	Kota Tangerang	9,00	8,90	11,20	-
6	Kota Cilegon	2,82	0,50	-	0,10
7	Kota Serang	29,07	18,19	-	6,50
8	Kota Tangerang Selatan	15,35	11,10	11,95	10,36
Jumlah		384,79	194,32	60,31	213,47

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.141
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Banten (km) Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Aspal	Tidak diaspal	Lainnya	Jumlah
1	Kab Pandeglang	238,34	-	-	238,34
2	Kab Lebak	404,72	-	-	404,72
3	Kab Tangerang	123,30	-	-	123,30
4	Kab Serang	299,23	-	-	299,23
5	Kota Tangerang	36,77	-	-	36,77
6	Kota Cilegon	26,89	-	-	26,89
7	Kota Serang	142,37	-	-	142,37
8	Kota Tangerang Selatan	57,76	-	-	57,76
Jumlah		1 329,38	-	-	1 329,38

Sumber:SIPD Provinsi Banten

Selanjutnya guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi, di Provinsi Banten telah terdapat 4 (empat) bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan Bandara Pondok Cabe. Begitu juga dengan moda transportasi laut, dimana terdapat 2 (dua) pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga) pelabuhan umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan perikanan. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transportasi di Provinsi Banten.

2.4.4.3. Rasio Ketergantungan

Sebanyak 27,51 persen penduduk Banten berusia muda (0-14 tahun), 69,57 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan hanya 2,92 persen yang berumur 65 tahun lebih. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Banten sebesar 46,14

Tabel 2.142
Tingkat ketergantungan / rasio ketergantungan
Tahun 2014-2016

Kabupaten/ Kota	2014			2015			2016		
	Jumlah Penduduk Usia<15-64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- tungan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia<15- 64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- tungan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia<15-64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- tungan Penduduk
Kabupaten									
1. Pandeglang	748.293	440.112	58,82	745.153	440.758	58,44	759.094	441.418	58,15
2. Lebak	809.158	450.147	55,63	817.685	452.127	55,29	825.341	454.071	55,02
3. Tangerang	2.242.066	1.022.710	45,61	2.317.669	1.052.925	45,43	2.393.975	1.083.520	45,26
4. Serang	963.860	499.234	51,80	972.969	501.332	51,53	981.102	503.400	51,31
Kota									
5. Tangerang	1.443.544	556.350	38,54	1.479.769	567.336	38,34	1.515.630	578.076	38,14
6. Cilegon	279.499	125.804	45,01	284.709	127.397	44,75	289.755	128.950	44,50
7. Serang	419.949	211.152	50,28	428.724	214.481	50,03	437.240	217.764	49,80
8. Tangerang Selatan	1.072.001	420.998	39,27	1.109.911	433.298	39,04	1.148.071	445.741	38,83
Provinsi Banten	7.978.370	3.726.507	46,71	8.165.589	3.789.654	46,41	8.350.208	3.852.940	46,14
Indonesia	169.334.100	82.830.700	48,92	171.874.200	83.587.500	48,63	174.375.100	84.329.900	48,36

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal disingkat SPM diterapkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal adalah urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Secara umum tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangan provinsi

- 1. SPM Pendidikan
 - ❖ Pendidikan Menengah dan
 - ❖ Pendidikan Khusus

Tabel 2.143
Sekolah Menengah di Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Jumlah SMA	Jumlah SMK
1	Pandeglang	39	94
2	Lebak	55	55
3	Kabupaten Tangerang	159	194
4	Kabupaten Serang	79	51
5	Kota Cilegon	23	25
6	Kota Tangerang	83	133
7	Kota Serang	31	46
8	Kota Tangerang Selatan	83	80

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dalam SPM pendidikan dimana jumlah sekolah menengah ini perlu ada penambahan ruang kelas baru dan unit sekolah baru untuk memudahkan aksesibilitas bagi usia 16-18 tahun untuk bisa semua bersekolah di jenjang sekolah menengah.

Tabel 2.144
Jumlah Sekolah Khusus di Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta
1	Kab. Tangerang	1	17
2	Kab Pandeglang	1	16
3	Kabupaten Lebak	3	9
4	Kabupaten Serang	0	5
5	Kota Tangerang	0	16
6	Kota Tangerang selatan	0	18
7	Kota Serang	2	5
8	Kota Cilegon	0	4
	Total	7	90

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dari tabel diatas terlihat bahwa belum seluruh Kabupaten kota memiliki sekolah Khusus, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan kota Tangerang masih nihil, sekolah khusus banyak di tunjang oleh sekolah swasta.

2. SPM Kesehatan
- ❖ Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan

❖ Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- ❖ Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan Provinsi Banten saat ini berkembang menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat. Besarnya jumlah penduduk membawa konsekuensi dengan laju permintaan kebutuhan air minum yang tinggi. Tantangan penyediaan air minum semakin besar, karena perkembangan perkotaan dan permukiman di wilayah Banten berdampak terhadap berkurangnya daerah tangkapan air maupun distribusi air alamiahnya (sungai) dengan kualitas air yang layak konsumsi. Sementara pemenuhan kebutuhan air bersih membantu upaya pencapaian Millenium Development Goals.

Tabel 2.145
Persentase Sumber Utama Air Minum di Wilayah
Provinsi Banten Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Sumber Utama Air Minum					Jumlah
	Air dalam kemasan	Ledeng	Pompa / Sumur Bor	Sumur	Lainnya	
Pandeglang	11,94	4,4	17,42	39,37	26,86	100
Lebak	12,89	1,85	15,41	41,85	28,01	100
Tangerang	51,47	4,54	32,65	10,73	0,61	100
Serang	50,5	3,16	25,25	12,37	8,73	100
Kota Tangerang	71,69	5,2	21,69	1,38	0,05	100
Kota Cilegon	75,81	2,47	19,64	2,09	0	100
Kota Serang	62,96	1,41	23,08	12,55	0	100
Kota Tangerang Selatan	49,38	0,69	44,57	5,37	0	100
Provinsi Banten	48,07	3,45	27,1	14,5	6,89	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Data tersebut menggambarkan sumber utama air minum terbesar adalah air minum dalam kemasan yaitu sebesar 48,07 sementara layanan air ledeng hanya sebesar 3,45%. Hal ini berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap kebutuhan air minum cukup tinggi (harga air minum dalam kemasan yang non ekonomis). Sementara pengambilan air menggunakan pompa/sumur bor secara berlebihan secara terus menerus dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan.

Dengan meningkatnya kebutuhan air minum dan makin berkurangnya daerah resapan air di perkotaan dan pemukiman dapat diatasi dengan sistem perpipaan air minum yang berasal dari mata air. Mengingat sumber-sumber air berada di luar kawasan perkotaan dan pemukiman maka dibutuhkan sistem perpipaan air bersih lintas daerah.

- ❖ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Air Limbah domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Contoh limbah cair domestic adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja.

Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah cair. Sumber limbah cair rumah tangga bersifat organik yaitu dari sisa-sisa makanan dan deterjen yang mengandung fosfor. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan pH air. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang banyak menimbulkan

kerugian bagi manusia dan lingkungan.

Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, dimana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standard baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat air limbah domestik kandungan terbesar adalah bahan organik, maka parameter kunci yang umum digunakan adalah BOD, COD dan lemak/minyak. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, maka parameter kunci untuk air limbah domestik adalah pH, BOD, COD, TSS, Lemak & Minyak, Amonia Total, dan Total Koliform.

Dengan berkembangnya kawasan pemukiman yang tidak lagi berdasarkan batas wilayah administrasi dituntut pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan

SPM Bidang Perumahan adalah tolok ukur kinerja pelayanan perumahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian.

Sementara berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengenai SPM dijelaskan bahwa salah satu pencapaian SPM bidang permukiman adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

Secara teknis SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Secara umum bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya sehingga jumlah korban maupun bangunan yang rusak dan hancur dapat bersifat fluktuatif sehingga perencanaan yang dilakukan adalah dengan melihat bangunan dalam hal ini rumah yang terkena dampak bencana.

Tabel 2.146
Data Kerusakan Rumah Akibat Bencana selama
Periode 2016-2020 di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Rumah (unit)			
	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam
Pandeglang	56	132	102	345
Lebak	189	176	916	4024
Tangerang	0	0	0	3631
Serang	255	22	58	3124
Kota Tangerang	0	0	0	1977
Kota Cilegon	0	0	3	491
Kota Serang	0	0	0	0
Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0
JUMLAH	500	330	1079	13592

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Data tersebut merupakan data akumulasi rumah dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, rusak ringan maupun terendam yang diakibatkan oleh bencana seperti bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Dalam data terlihat bahwa wilayah yang rentan kerusakan rumah akibat bencana berada pada Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Untuk penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana ditentukan oleh status bencana yang dikeluarkan oleh pimpinan nasional atau daerah. Jika status bencana dikeluarkan oleh Gubernur maka pemerintah provinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

- ❖ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Pemerintah mempunyai rencana pembangunan yang bersifat spasial atau membutuhkan ruang / kawasan. Terkait dengan hal tersebut tentu perlu diikuti dengan pengadaan lahan yang berasal dari masyarakat, swasta maupun menggunakan lahan milik pemerintah. Apabila lahan masyarakat yang akan digunakan oleh kegiatan pemerintah merupakan lahan terbangun (termasuk rumah) maka salah satu klausul adalah pemerintah wajib membangunkan kembali atau relokasi ke tempat yang baru. Tentu saja pemerintah harus merelokasi rumah masyarakat yang terkena program pemerintah dalam kondisi rumah yang layak huni sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dalam hal pembangunan suatu kawasan yang dilakukan pemerintah, salah satu prasyarat adalah adanya pembebasan lahan. Pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maka pemerintah provinsi yang melakukan pembebasan lahan. Sementara pada beberapa kegiatan pemerintah pusat disyaratkan pemerintah daerah (provinsi) yang harus menyediakan lahan bagi kepentingan pemerintah tersebut.

Dalam kurun waktu 2016-2020 terdapat pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa Program Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Peraturan Presiden 56 Tahun 2018, terdapat 13 PSN di Provinsi Banten, yaitu

- 1) Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang
- 2) Jalan Tol Kunciran – Serpong
- 3) Jalan Tol Serpong – Cinere
- 4) Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran
- 5) Jalan Tol Serpong – Balaraja
- 6) Jalur KA Ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman),
- 7) Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar (Tangerang),
- 8) Tanggul Laut,
- 9) Bendungan Sindang Heula,
- 10) Bendungan Karian,
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
- 12) Kawasan Industri Wilmar Serang, dan
- 13) Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik dan Air Bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung.

Sementara rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Banten secara spasial atau kawasan dituangkan pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana Kawasan Strategis Provinsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, Kawasan Strategis Provinsi Banten adalah :

Tabel 2.147
Kawasan Strategis Provinsi

Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi	1. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) 2. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) 3. Kawasan Serang Utara Terpadu 4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu 5. Kawasan perbatasan
Sosial dan Budaya	Kawasan Situs Banten Lama
Pendayagunaan Sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	Bendungan Karian
Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta

Sumber : RTRW Provinsi Banten (Perda Nomor 5/2017)

Selain itu adanya pengembangan secara spasial kebijakan daerah yang menjadi prioritas daerah diantaranya :

- Pembangunan dan pengembangan 6 ruas jalan baru Provinsi Banten
 - Gerbang Tol Serang Baru (Bogeg)
 - Akses Tol Cikeusal (Cikeusal - Boru)
 - Relokasi Jalan Palima - Baros
 - Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Serang (Serang South Outer Ring Road), Palima - Kramatwatu
 - Pembangunan Jalan Lingkar Utara Serang (North Outer Ring Road), Pakupatan - Kramatwatu
 - Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Serang (Serang South Inner Ring Road) Cipocok - Drangong)
 - Relokasi Jalan Banten Lama
 - Sudirman - Bogeg (Railway Frontage)
- Penataan bangunan monument dan bersejarah seperti :
 - Penataan Caringin
 - Penataan Cikaduen

Dengan adanya Kawasan Strategis Provinsi, kebijakan pengembangan jalan baru, penataan bangun serta adanya rencana struktur serta pola ruang dimana direncanakan pembangunan pada jaringan infrasktur sesuai dengan kewenangan provinsi maka pemerintah provinsi wajib membangunkan kembali atau relokasi ke tempat yang baru

rumah masyarakat yang terkena program pemerintah provinsi dalam kondisi rumah yang layak huni.

5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten bisa dilihat dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, yang didalam perda tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur untuk melakukan penegakan Peraturan daerah (PERDA), beberapa turunan nya yaitu; Pergub SOP Penindakan Yustisial, Pergub Tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur, Pergub Tata cara Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat sampai saat ini belum ada aturan turunannya.

Tabel 2.148
Jumlah LINMAS dan Rasio Linmas Kab/Kota di Provinsi Banten

Kab/Kota	Jumlah Linmas 2018	Jumlah Penduduk	Rasio Linmas
Kota Cilegon	2.428	425.103	1;175
Kota Serang	3.656	666.600	1;274
Kota Tangerang	10.204	2.139.891	1;209
Kota Tangerang selatan	7.638	1.644.899	1;215
Kabupaten Lebak	7.984	1.288.103	1;161
Kabupaten Pandeglang	7.812	1.205.203	1;154
Kabupaten Serang	9.234	1.493.591	1;161
Kabupaten Tangerang	18.020	3.584.770	1;198
Total	66.976	12.448.160	1;185

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Jika dilihat dari table berikut rata-rata linmas yang masih rasio nya besar adalah Kota serang 1;274, artinya 1 orang linmas mengawasi 274 orang. Untuk itu perlu beberapa upaya dilakukan warga untuk menjaga keamanan, diantaranya dengan membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota linmas.

6. SPM Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (6) Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM bidang Sosial Provinsi meliputi:

- ❖ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- ❖ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS melalui panti sesuai kewenangan masuk menjadi urusan Provinsi. Saat ini Provinsi Banten memiliki dua UPTD dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi Banten.

Tabel 2.149
Panti Rehabilitasi Di Provinsi Banten Tahun 2018

No	Nama Panti	Kab/Kota	PMKS yang ditangani	Daya Tampung	Existing
1	UPTD Perlindungan Sosial	Cipocok serang	Lanjut usia, Anak terlantar, balita terlantar, disabilitas intelektual	75 org	51 org
2	UPTD Panti Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)	Pasir Ona Lebak	Gelandangan Pengemis Disabilitas	40 org	15 org

Sumber: Diolah dari UPTD Panti Provinsi Banten

Tabel 2.150
Jumlah Pegawai Panti Rehabilitasi UPTD Perlindungan Sosial

Pegawai	Nama jabatan	Jumlah
Pegawai struktural	Kepala UPTD, Kasubag TU, Kasi, Bendahara, Pengadministrasi umum, Pengolah data	7 orang
Pegawai honorer non professional	pramubakti, pamdal, supir, tukang kebun, binatu	19 orang
Tenaga professional honorer	perawat, pekerja sosial, juru masak	10 orang
Tenaga Profesional ASN	pekerja Sosial , Penyuluh Sosial, perawat	Nihil

Sumber: Dokumen Profil Panti UPTD Panti Provinsi Banten

Dari tabel diatas panti yang di kelola oleh Pemerintah daerah Provinsi Banten selain baru ada dua panti rehabilitasi dari tabel terlihat Panti kekurangan tenaga professional sehingga berpengaruh pada kegiatan dan keberlangsungan panti untuk dikelola secara lebih baik dan bisa sesuai dengan kebutuhan PMKS yang berada di bawah naungan panti di Provinsi Banten.

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi penting dilakukan dan direncanakan karena bencana tsunami yang terjadi Desember tahun 2018 beberapa waktu lalu membuat

Pelaksanaan SPM sebagai urusan pemerintahan wajib tetap berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan kementerian teknis, atas dasar itulah Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan kebijakan penetapan indikator SPM sedianya melakukan pentahapan dalam jenis pelayanan, mutu pelayanan dan atau sasaran/lokasi tertentu. Sedangkan untuk target SPM harus 100% setiap tahunnya mengingat SPM merupakan pelayanan yang minimal tentunya harus dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

2.6. Data Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2018

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Provinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintahan Provinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran per PD beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2018 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio. Adapun capaian tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.151
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017 – 2018

URAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2017		2018	
	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI
I P M (Poin)	71,35	71,42	71,77	71,77
L P E (%)	5,70	5,73	6,00	5,81
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,25	5,59	5,13	5,25
Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,69	9,28	8,45	8,52
Tingkat Inflasi (%)	4,00	3,98	3,70	3,42
Gini Ratio (%)	0,40	0,39	0,39	0,37

Sumber : SIPD Provinsi Banten Tahun 2018

Sebagaimana tabel diatas, Indikator makro pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2018 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio mengalami fluktuasi.

Sub Bab ini menjelaskan rincian target dan realisasi capaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2018 pada setiap program yang diukur/dievaluasi capaiannya pada 129 program 230 indikator kinerja, dan rata-rata capaian sebesar 97,11%.

Tabel 2.152
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Tahun 2017 – 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan Daerah Yang Berakhlakul Karimah Dengan Efektif, Efisien, Transparan,Akuntabel Dan Sumber Daya Aparatur Berintegritas,Berkompetensi Serta Melayani Masyarakat	1. Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan : %)	70,00	70,00	100
		2. Indeks keterbukaan informasi publik (satuan : %)	88,08	76,00	86,29
		3. Capaian Maturitas SPIP (Satuan : Nilai)	3	3,02	Tercapai

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
		4. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan : Peringkat)	65,00	65,00	100
		5. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Satuan : %)	59,30	61,68	104,01
		6. Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Daerah	WTP	WTP	Tercapai
2	Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang, Orang dan Jasa yang Berorientasi pada Peningkatan Pembangunan Wilayah dan perekonomian Daerah	7. Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan : %)	87,43	91,40	104,55
		8. Persentase Rumah Layak Huni (Satuan : %)	84,02	97,01	115,46
		9. Luasan Kawasan Kumuh yang Ditata (Satuan : hektar)	114,60	58,22	50,80
3	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlaqul Karimah dan Berdaya saing	10. Rata – rata lama sekolah (Satuan : Tahun)	8,47	8,71	102,83
		11. Indeks Pembangunan Gender (Satuan : Nilai)	91,67	68,30	98,19
		12. Persentasepeningkatan minat baca masyarakat (Satuan : %)	30,00	30,00	100
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	13. Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)	31	4,6	100
		14. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	304	100	100
		15. Angka Harapan Hidup (Satuan : Tahun)	69,76	64,69	99,61
5	Meningkatnya Perekonomian Banten Melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kecukupan Pangan dan Energi, Pengembangan Sumber Daya Alam yang Mamberikan Solusi Terhadap Pangangguran dan Kemiskinan	16. Pesentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan : %)	4,49	4,79	106,79
		17. Indeks Gini (Satuan : %)	0,39	0,39	100,00
		18. Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan : %)	89,20	89,10	99,89
		19. Jumlah Nilai Investasi (Satuan : Trilliun)	56,40	56,52	100,00

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
		20. Laju Pertumbuhan sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan : %)	4,55	2,930	64,40
		21. 21. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (Satuan : %)	2,89	2,88	99,63
		22. Laju Pertumbuhan sektor Pertanian terhadap PDRD (Satuan : %)	5,30	3,58	67,55
		23. Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan : %)	4,00	4,00	100

Tabel 2.153
Pengukuran Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	1. Nilai IKM	2,80	2,41	86,06
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (satuan : %)	72,90	84,23	115,54
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan : %)	58,77	62,02	105,53
		4. Angka Putus Sekolah SMA (Satuan : Nilai)	0,22	0,21	95,45
		5. Angka Putus Sekolah SMK (Satuan : Nilai)	0,44	0,32	72,73
		6. Angka Kelulusan SMA (Satuan : Nilai)	98,64	100	101
		7. Angka Kelulusan SMK (Satuan : Nilai)	99,89	100	101
		8. Nilai Rata – rata ujian SMA IPA (Satuan : %)	51,96	50,63	97,44
		9. Nilai Rata – rata ujian SMK (Satuan : %)	55,50	41,85	75,41
		10.Nilai Rata – rata ujian SMA IPS (Satuan : %)	48,68	43,88	90,14
		11. Persentase SMK yang menerapkan link and match (satuan : %)	17,00	76,15	447,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		12. Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan : %)	17,00	33,33	196
		13. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan : Nilai)	56,98	56,23	98,68
		14. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan : Nilai)	64,86	64,57	99,55
		15. Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan : %)	96,21	96,48	100,28
		16. Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan : %)	54,63	92,85	169,96
		17. Persentase Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan : %)	20,00	27,50	137,50
3	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	18. Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten	85,00	90,00	105,88
		19. Cakupan Organisasi Kesenian (pembinaan sanggar/keompok seni dan budaya) (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		20. Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		21. Cakupan Pelestarian Nilai – Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		22. Cakupan Pelayanan Museum (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		23. Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
4	Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Mudah di Akses	24. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan : %)	65,00	84,30	129,69
		25. Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		26. Persentase Kab/Kota Yang Telah Mendapatkan Dukungan Program Kesehatan (Satuan : %)	55,00	55,00	55,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
5	Keikutsertaan Masyarakat dalam jaminan kesehatan	27. Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan : %)	90,00	91,50	101,67
		28. Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP,FKRTL,Laboratorium) (Satuan : %)	65,00	75,21	115,71
		29. Persentase terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
		30. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
6	Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan standar pelayanan Minimal	31. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		32. Capaian SPM Pelayanan keperawatan RSUD Banten (Satuan : %)	88,00	88,00	100,00
		33. Capaian Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan : %)	70,00	69,00	98,57
		34. Cakupan Kualitas Pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan : %)	60,00	48,00	80,00
		35. Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping	40,00	17,99	44,98
		36. Indeks Kepuasan Pelanggan (Satuan : %)	60,00	44,50	74,17
		37. Persentase Kab/Kota Yang Telah Mendapatkan Dukungan Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Krisis Kesehatan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		38. Jumlah Dokter / Dokter Gigi, Tenaga kesehatan yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (satuan : orang)	70	70	100,00
		39. Persentase Pemenuhan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan (Satuan : %)	70,00	95,33	136,19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		40. Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan : %)	50,00	31,06	62,11
		41. Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Yang Di Layani (Satuan : %)	32,00	32,00	100,00
		42. Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja Di Wilayah Kerja BKKM (Satuan :%)	6,40	0,00	0,00
7.	Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas	43. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	79,56	91,406	114,89
		44. Persentase jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan : %)	27,20	26,92	98,97
		45. Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	86,30	88,70	102,78
8.	Perencanaan dan Penataan Ruang yang berkualitas	46. Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 kawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	25,00	12,50	50,00
		47. Persentase Badan Usaha Jasa Kontruksi Yang Memenuhi Standar (Satuan : %)	10,00	9,07	90,07
9.	Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta ketersediaan Air Baku	48. Cakupan Pemulihan Dan Pencegahan Banjir (Satuan : %)	20,89	20,84	99,76
		49. Luas layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan : ha)	15.332,98	15.312,06	99,86
		49. Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan : %)	51,59	46,21	89,62
10.	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Layak Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	50. Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : ha)	114,60	58,22	50,80
		51. Persentase Rumah tidak layak huni yang ditangani (satuan : %)	84,02	97,01	115,46
		52. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	25,00	25,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		53. Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	28,00	36,84	147,36
		54. Cakupan Rumah Tangga yang memiliki akses Air Bersih (satuan : %)	72,75	74,90	102,96
		55. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi (satuan : %)	72,86	71,09	97,57
		56. Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
11.	Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	57. Cakupan Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum Daerah Provinsi (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		58. Persentase Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		59. Cakupan Perlindungan Masyarakat (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		60. Cakupan Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
12.	Sistem penanggulangan kebencanaan yang efektif	61. Cakupan Mitigasi Dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		62. Presentase Ketersediaan Peralatan Dan Logistik, Prabencana Dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		63. Presentase Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi, Sarana Dan Prasarana Pasca Bencana (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
13.	Wawasan kebangsaan, keamanan dan stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	64. Cakupan Pembinaan Dan Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan : %)	22,00	22,00	100
		65. Prosentase Penurunan Peristiwa Gangguan Keamanan Dalam Daerah (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		66. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan (satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		67. Angka Partisipasi Pileg (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
		68. Angka Partisipasi Pilgub (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
		69. Angka Partisipasi Pilpres (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
		70. Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan : %)	65,00	65,00	100,00
14	Menurunnya PMKS	71. Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial (satuan : orang)	913	913	100,00
		72. Cakupan PSKS Yang meningkat Partisipasinya Sosial (Satuan : Orang)	5.755	5.755	100,00
		73. Persentase updating Data PMKS (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		74. Cakupan Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Mendapat Perlindungan (Satuan : Orang)	1.103	1.103	100,00
		75. Cakupan Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Satuan : kk)	32.676	31.158	95,35
		76. Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan social Keterampilan pada Balai pemulihan dan Pengembangan sosial (Satuan : orang)	110	110	100,00
		77. Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan sosial (Satuan : orang)	160	160	100,00
15.	Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat	78. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan : %)	4,35	6,82	156,78
		79. Capaian Hubungan Industrial (Satuan : %)	3,66	3,02	82,51
		80. Capaian Pengupahan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan : %)	10,00	10,00	100
		81. Capaian Jaminan Sosial Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan : %)	2,98	10,00	105,15
		82. Capaian Kesempatan Kerja (Satuan : %)	15,25	13,92	91,28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		83. Capaian Pelatihan Dan Kompetensi Kerja (Satuan : %)	1,25	2,05	184,68
16.	Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	84. Cakupan Data Terpilih Gender Dan Anak (Satuan : %)	60,00	60,00	100,00
		85. Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan : %)	50,00	50,00	100,00
		86. Rasio Partisipasi Perempuan Di Lembaga Legislatif, Swasta Dan Pemerintah	58,72	55,11	93,86
		87. Cakupan Kabupaten /Kota Yang Memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan : %)	75,00	71,37	95,16
		88. Indeks Ketahanan keluarga (Satuan : %)	66,66	64,93	97,40
		89. Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	85,00	84,11	98,95
		90. Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak (Satuan:%)	85,00	81,38	95,74
		91. Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	60,00	58,63	97,71
17.	Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	92. Rasio Bayi Berakte Kelahiran (Satuan : %)	64,86	61,64	95,04
		93. Rasio Pasangan Berakte Nikah (Satuan : %)	23,33	24,37	104,46
		94. Rasio kepemilikan KTP el dan NIK (Satuan : %)	85,76	91,95	107,22
		95. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk (Satuan :%)	79,19	74,29	93,81
		96. Cakupan Data Dan Informasi Kependudukan (Satuan :%)	85,00	83,62	98,38
18.	Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	97. Angka Kelahiran Total Per WUS (15 -49 tahun) (Satuan : jumlah)	2,33	2,30	98,71
		98. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Satuan :%)	60,90	73,17	120,15
		99. Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (satuan : %)	10,26	13,20	128,65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		100.Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (Satuan : %)	2,53	2,50	98,81
19.	Ketahanan pangan daerah yang terjaga	101. Ketersediaan pangan (satuan : %)	95,10	99,91	105,05
		102.Keterjangkauan/akses pangan (satuan :%)	82,50	82,50	100,00
		103. Pemanfaatan pangan (satuan : %)	90,00	90,00	100,00
20.	Lingkungan hidup yang berkualitas	104. Indeks kualitas Air (Satuan : Nilai)	51,50	52,33	101,612
		105. Indeks Kualitas Udara (Satuan : Nilai)	59,00	72,36	122,64
		106. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Satuan : Kelompok/Lembaga)	52,00	88	169,23
21.	Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	107. Luas lahan kritis yang terehabilitasi (satuan : hektar)	5.000	7.990	159,8
		108. Persentase peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (satuan :%)	10,00	12,86	128,60
22.	Desa Tertinggal Yang Berkembang Dan Mandiri	109. Cakupan Desa Tertinggal Menjadi Berkembang (Satuan : Desa)	2	2	100,00
		110. Cakupan Desa Berkembang Menjadi Mandiri (Satuan : Desa)	2	2	100,00
		111. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Kategori Baik (Satuan : Jumlah)	41	41	100,00
		112. Cakupan Kerjasama Desa Yang Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan : Jumlah)	2	2	100,00
23.	Terwujudnya Keselamatan Dan Kenyamanan Lalulintas	113.Persentase Regulasi Dan Pedoman Standar Pelayanan Transportasi Yang Diterapkan (Satuan :%)	20,00	20,00	100,00
		114. Persentase Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum (Satuan : %)	0,00	0,00	00,00
24.	Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	115. Persentase Kebutuhan Terminal Type B Yang Sudah Terpenuhi (Satuan : B)	0,00	0,00	0,00
		116. Persentase Ketersediaan Rambu – Rambu Lalulintas Terhadap Kebutuhan (Satuan : %)	10,00	9,7	97,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		117. Persentase Pembangunan Dan Pemeliharaan Dan Prasarana Perkeretaapian (Satuan : %)	10,00	10,00	100
		118. Persentase Pengaturan Rekayasa Lalulintas Di Ruas Jalan Provinsi (Satuan : %)	100,00	23,38	23,38
		119. Persentase Pengendalian, Penertiban Dan Pengawasan Penyelenggara-an Angkutan (Satuan ; %)	100,00	42,00	42,00
		120. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional Operasional (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
25.	Pelayanan Pemerintahan yang berbasis Teknologi dan Keterbukaan Informasi	121. Persentase ketersediaan Perangkat TI (Satuan : %)	30,26	34,32	113,41
		122. Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana persandian dan Keamanan Informasi (satuan : %)	20,00	20,00	100,00
		123. Persentase pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (satuan : %)	20,00	24,98	124,92
26.	Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	124. Persentase Keterpakaian Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (Satuan : %)	50,00	50,00	100,00
27.	Usaha Kecil yang berdaya	125. Persentase usaha kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain(satuan : %)	1,00	1,00	100,00
		126. Capaian Koperasi Aktif (satuan : %)	6,00	6,00	100,00
28.	Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	127. Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan : %)	6,00	6,00	100,00
		128. Persentase Realita Implementasi Hasil Pelatihan Terhadap Total Peserta Pelatihan Koperasi (Satuan : %)	6,00	6,00	100,00
		129. Persentase Realita Implementasi Hasil Pelatihan Terhadap Total Peserta Pelatihan Usaha Kecil (Satuan : %)	1,00	1,00	100
29.	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kemudahan berusaha	130. Nilai Realisasi Investasi PMDN (satuan : triliyun)	13,40	18,64	139,10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		131. Nilai Realisasi Investasi PMA (satuan : Triliyun)	43,00	37,88	88,09
		132. Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		133. Persentase Realisasi Perizinan sesuai standar pelayanan (satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		134. Cakupan potensi investasi yang terealisasi (satuan : %)	17,03	26,13	153.43
30.	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan olahraga yang berprestasi	135. Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan Dan Kewirausahaan Pemuda Mandiri (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		136. Persentase Pemuda Wirausahawan Baru Yang Difasilitasi (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		137. Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan : %)	70,00	75,00	100,00
		138. Cakupan keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		139. Cakupan pembinaan olahraga (satuan : %)	75,00	75,00	100,00
31.	Minat Baca Masyarakat yang meningkat	140. Cakupan Pembinaan Perpustakaan Umum Dan Perpustakaan Khusus (Satuan :%)	85,00	85,00	100,00
		141. Cakupan pelayanan Perpustakaan sesuai standar minimal perpustakaan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
32.	Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Yang Berkualitas	142. Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		143. Persentase digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		144. Persentase pengelolaan Arsip OPD Sesuai Standar (Satuan : %)	85,00	85,00	100,00
33.	Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	145. Persentase Produksi Perikanan (Satuan : %)	8,01	8,00	99,88
		146. Luas Laut yang terawasi (satuan : %)	100,00	98,00	98,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		147. Persentase usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		148. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan :nilai)	116	106,57	91,87
34.	Pertumbuhan Ekonomi sektor Pariwisata yang Optimal	149. Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan : lokasi)	1	1	100,00
		150. Jumlah Kunjungan Wisatawan (satuan : orang)	15.146.936	15.146.936	100,00
		151. Rata – rata lama kunjungan (Satuan : hari)	1,36	1,36	100,00
		152. Rata – rata pengeluaran wisatawan (satuan : Rp)	3.743.525	3.743.525	100,00
		153. Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (satuan : orang)	300	300	100,00
		154. Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
35.	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang Optimal	155. Capain Produktivitas Tanaman Padi (satuan : ton/Ha)	57,35	48,88	85,23
		156. Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan ; Ton)	2.408.671	1.603.556	66.57
		157. Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan ; Ton)	21.579	210.556	975.74
		158. Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan ; Ton)	7.141	14.751	206,57
		159. Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan ; Ton)	8.246	10.997	133,12
		160. Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan ; Ton)	735,00	920.7	125,27
		161. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan : Kg/Ha)	3.343	2.043,93	61,14
		162. Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan : Ton)	1.728	4.167,54	101,95
		163. Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan : Ton)	43.978	44.833,49	101,95
		164. Peningkatan Produksi Daging (Satuan : Ton)	33,52	23,47	70,02

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		165. Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan : %)	85,00	85	100
		166. Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		167. Persentase Struktur Industri Pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan : %)	20,00	30,00	150,00
		168. Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri Yang Aktif (Satuan : %)	20,00	24,00	120,00
		169. Rasio Pertumbuhan Industri Kreatif (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
36.	Pengendalian, Pengawasan Dan Perijinan Geologi,Air Tanah, Mineral Dan Batubara Yang Efektif	170. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dan Rekomendasi Perijinan (Satuan : %)	65,00	65,00	100,00
		171.Persentase Badan Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Standar (Satuan : %)	41,10	41,10	100,00
37.	Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	172. Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan : Rumah Tangga)	10.000	10.000	100,00
		173. Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (satuan : %)	16,17	16,17	100,00
38.	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Yang Optimal Dan Inflasi Yang Terkendali	174. Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan : %)	5,00	1,65	Harga Stabil
		175. Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan : %)	10,00	21,23	212,00
		176. Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok (Satuan : %)	5,00	1,22	Harga Stabil
		177. Neraca Ketersediaan Barang Pokok (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		178. Surplus Neraca Perdagangan (Satuan : Juta USD)	2.970	950,77	Defisit
		179. Indeks Tendensi Konsumen (satuan satuan : nilai)	108,00	111,35	103,1
		180. Persentase Pelayanan Sertifikasi Dan Standarisasi (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		181. Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar Dan Bersertifikasi (Satuan : Jumlah)	200,00	359	179,5
39.	Terwujudnya Peran DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	182. Capaian % kinerja Fungsi DPRD (Satuan : %)	100,00	95	95,00
		183. Rasio ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		184. Capain % pelayanan keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan reses DPRD (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
40.	Pelayanan Publik yang berkualitas	185. Cakupan Koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan : %)	70,00	100,00	100,00
41.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel	186. Persentase OPD Yang Memiliki Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan : %)	30,00	30,00	100,00
		187. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		188. Presentase Keselarasan Kebijakan Pada Bidang Ekonomi (Satuan : %)	17,27	17,27	100,00
		180. Persentase Realisasi Target Prolegda (Satuan : %)	100,00	80,00	80,00
		181. Presentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah Dengan Regulasi Hukum Nasional (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		182. Persentase Raperda Inisiatif Yang Memiliki Naskah Akademik (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		183. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Infrastruktur (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		184. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Kesra (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		185. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		186. Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		187. Capaian % Kinerja Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		188. Capaian % Kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		189. Capaian % Kinerja Pelayanan keprotokolan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		190. Persentase Prasarana Dan Sarana Penunjang Kinerja Di Lingkungan Setda Dalam Kondisi Baik (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
42.	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi	191.Capaian Nilai Sakip (Satuan : %)	75,00	-	-
		192.Indeks Integritas (Satuan : Poin)	73,48	-	-
		193. Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan : Nilai)	3,00	3,02	Tercapai
43.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	194. Persentase Dokumen Perencanaan Rpjpd,Rtrw, Dan Rpjmd Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		195. Persentase Dokumen Perencanaan : Rkpd Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		196. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		197. Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		198. Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan (Satuan : %)	70,00	75,71	108.15
		199. Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan (Satuan : %)	70,00	63,43	90.61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		200. Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan (Satuan : %)	70,00	78,21	111,72
44.	Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	201. Persentase Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan (Satuan : %)	50,00	69,31	138,62
		202. Persentase Inovasi Yang Diadopsi (Satuan : %)	50,00	62,37	124,74
45.	Pendapatan Daerah yang optimal	201. Persentas Peningkatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Satuan : %)	57,58	59,09	102,62
		202. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain –Lain Terhadap Pendapatan Daerah (Satuan : %)	42,42	41,62	98,11
		203. Persentase Potensi Tunggal Pajak Daerah Yang Dapat Di Selesaikan (Satuan : %)	14,20	25,00	176,06
46.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	204. Persentase Kepatuhan Opd Terhadap Peraturan Perundang – Undangan Di Bidang Keuangan (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		205. Persentase Kesesuaian Laporan Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		206. Capaian Tertib Administrasi Aset Daerah (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
47.	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur	207. Prosentase Pegawai Yang Didistribusikan Sesuai Hasil Pemetaan (Satuan : %)	85,00	82,10	96,58
		208. Prosentase Pegawai Yang Tidak Melanggar Kode Etik Dan Disiplin Pegawai (Satuan : %)	85,00	85,00	100,00
		209. Prosentase Akurasi Data Kepegawaian (Satuan : %)	85,00	77,64	90,64
		210. Prosentase Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kompetensinya (Satuan : %)	85,00	67,85	79,82

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
48.	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	211. Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan Dan Prajabatan, Manajemen Dan Pemerintahan Yang Lulus Berkategori Baik (Satuan : %)	80,00	88,72	110,9
		212. Rasio Peserta Diklat Teknis Umum,Substansif, Fungsional Yang Lulus Berkategori Baik (Satuan : %)	80,00	89,76	112,2
		214. Prosentase Kompetensi Dan Profesionalisme Penyelenggara Diklat (Satuan : %)	80,00	93,97	117,46